

## RINGKASAN

Implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame Kabupaten Banyumas sebagai perwujudan dimana pertumbuhan reklame di Kabupaten Banyumas harus rapih dan tidak merusak keindahan tata ruang kota. Pemerintahan Kabupaten Banyumas dengan kewenangannya menurunkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Banyumas. Tujuan adanya Peraturan Daerah tersebut yakni mengimplementasikan kebijakan tentang penyelenggaraan reklame. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyumas.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja, Dewan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan, dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian model kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Pemilihan informan menggunakan *teknik purposive sampling* dan untuk memperoleh data penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyumas yang belum optimal. Aspek komunikasi sudah optimal dimana Dinas yang terkait dengan kebijakan penyelenggaraan reklame sudah menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan cara sosialisasi dan koordinasi. Aspek Sumber Daya belum optimal, karena Satpol PP masih kekurangan fasilitas untuk menertibkan reklame yang tidak sesuai Perda atau liar. Aspek disposisi belum optimal, dimana dinas yang terkait dengan penyelenggaraan reklame sudah melakukan tindakan partisipasif dengan baik dan sesuai dengan tupoksinya namun DPMPP dan BKD tidak dapat melakukan tindakan partisipasif dengan baik karena hanya memberikan pelayanan. Aspek hubungan dengan organisasi lain juga sudah lumayan optimal. Ketiga dinas saling berhubungan baik untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyumas.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Reklame.



## SUMMARY

Implementation of the implementation policy of Banyumas Regency as an embodiment where the growth of billboard in Banyumas Regency must be neat and not damage the beauty of urban spatial. Government of Banyumas Regency with the authority to decrease the Regional Regulation No. 9 of 2016 on the Implementation of Advertising in Banyumas Regency. The purpose of the Regional Regulation is to implement policies on the implementation of advertisements. This study aims to describe the policy of advertising in Banyumas regency.

The location of this research was conducted in Satuan Polisi Pamong Praja, Board of Investment and Licensing Service, and Regional Finance Agency of Banyumas Regency. The type of research conducted is a qualitative model research using descriptive analysis. Selection of informants using purposive sampling technique and to obtain research data using interviews, observation and documentation. While the data analysis technique using interactive analysis model.

The result of this research shows the implementation of policy of advertisement of advertisement in Banyumas Regency which not yet optimal. The aspect of communication has been optimal where the Dinas related to the policy of the implementation of advertisement have established good communication relationship by way of socialization and coordination. Resource aspect has not been optimal yet, because Satpol PP still lack facilities to curb unlawful or illegal billboards. The disposition aspect has not been optimal yet, whereas the offices associated with the signing of the advertisement have done the participative actions well and in accordance with the tupoksinya but DPMPP and BKD can not participate properly because they only provide services. Aspects of relationships with other organizations are also quite optimal. The three agencies are interconnected both to implement the policy of advertising in Banyumas regency.

Keyword: Implementation, Policy, Advertisement.